

**SRATEGI PENGUATAN INTEGRITAS APARATUR  
MELALUI NILAI KEAGAMAAN**

Mohammad Imron<sup>1</sup>, R.A Nurfadhilatun Nisa<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi,  
Universitas Madura, Pamekasan, Indonesia

Email Korespondensi: <sup>1</sup>[mohammadaliimron91@gmail.com](mailto:mohammadaliimron91@gmail.com),  
<sup>2</sup>[fanisafadhilatun@gmail.com](mailto:fanisafadhilatun@gmail.com)

*ABSTRAK*

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penguatan integritas aparatur melalui nilai keagamaan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui studi kajian pustaka. Data diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti jurnal ilmiah, buku, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai keagamaan seperti kejujuran (sidq), amanah, dan keadilan memiliki peran penting dalam membentuk integritas aparatur. Penguatan integritas melalui nilai keagamaan bersifat internal dan preventif karena mampu membentuk kesadaran moral individu. Namun, implementasi strategi ini masih menghadapi tantangan seperti formalisasi kegiatan keagamaan dan belum optimalnya internalisasi nilai. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan agar nilai-nilai keagamaan dapat diimplementasikan secara efektif dalam birokrasi.*

**Kata kunci:** integritas, aparatur, nilai keagamaan, birokrasi, etika publik

*ABSTRACT*

*This study aims to analyze strategies for strengthening the integrity of public officials through religious values and to identify factors influencing their effectiveness. This research uses a qualitative approach with a descriptive method through literature review. Data were collected from various sources such as scientific journals, books, and official documents relevant to the research topic. The results show that religious values such as honesty (sidq), trustworthiness (amanah), and justice play an important role in shaping the integrity of public officials. Strengthening integrity through religious values is internal and preventive as it builds individual moral awareness. However, the implementation still faces challenges such as the formalization of religious activities and the lack of optimal internalization of values. Therefore, a comprehensive and sustainable approach is needed to effectively implement religious values within the bureaucracy.*

**Keywords:** integrity, public officials, religious values, bureaucracy, public ethics

## **Pendahuluan**

Integritas aparatur merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Aparatur yang berintegritas tidak hanya dituntut untuk menjalankan tugas sesuai aturan, tetapi juga harus memiliki komitmen moral yang kuat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun dalam praktiknya, berbagai permasalahan seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan rendahnya etika pelayanan publik masih menjadi tantangan serius dalam birokrasi di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan integritas aparatur tidak cukup hanya melalui regulasi dan pengawasan formal, tetapi juga membutuhkan pendekatan yang lebih mendasar, yaitu pembentukan karakter dan nilai-nilai moral.

Pentingnya integritas tercermin dalam sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa *“when you are looking at the characteristics on how to build your personal life, first comes integrity; second, motivation; third, capacity; fourth, understanding; fifth, knowledge; and last & least, experience”*. Integritas menempati posisi pertama yang mencerminkan karakteristik individu dalam membangun kehidupan pribadinya, diikuti motivasi, kapasitas, pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman. Bahkan lebih lanjut dinyatakan bahwa: *“without integrity, motivation is dangerous; without motivation, capacity is impotent; without capacity, understanding is limited; without understanding, knowledge is meaningless; without knowledge, experience is blind”*. Tanpa integritas motivasi bisa menjadi bahaya, tanpa motivasi kapasitas menjadi tidak berdaya, tanpa kapasitas pemahaman menjadi terbatas, tanpa pemahaman pengetahuan menjadi tidak bermakna, tanpa pengetahuan pengalaman menjadi buta. (Sedarmayanti and Nurliawati n.d.)

pandangan (Ummah, 2019b) dalam (Rozi M, at.al 2024) Menurut Ummah, materi nilai-nilai keislaman yang diinternalisasikan dalam upaya pembentukan karakter bangsa harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip Pancasila, serta selaras dengan setiap sila yang terkandung di dalamnya.

Integritas publik merupakan konsep kunci dalam analisis etika dan kinerja birokrasi. Menurut (Huberts, 2018), integritas adalah kualitas moral yang tercermin dari konsistensi antara nilai, kata, dan tindakan pegawai publik ketika menjalankan kewenangannya. Integritas bukan hanya persoalan moral individu, tetapi juga melibatkan sistem organisasi, regulasi, dan budaya kerja. (OECD, 2017) menegaskan bahwa organisasi publik yang berintegritas memiliki mekanisme pengendalian etika, sistem pengawasan, dan budaya transparansi yang kuat. (Wulandari et al. 2026)

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam memperkuat integritas aparatur adalah melalui internalisasi nilai-nilai keagamaan. Nilai keagamaan memiliki peran penting dalam membentuk perilaku individu, karena mengandung ajaran tentang kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan amanah. Dalam konteks ini, agama tidak hanya dipahami sebagai ritual semata, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang mampu

membentuk etika dan moral aparatur dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, nilai-nilai keagamaan dapat menjadi landasan spiritual yang mendorong aparatur untuk bekerja secara profesional dan berintegritas.

Nilai *ṣidq* (kejujuran) muncul sebagai fondasi paling penting dalam pembentukan integritas komunikasi aparatur desa (Shuhari et al. 2020). Kejujuran informasi bukan hanya aspek moral, tetapi berfungsi sebagai mekanisme sosial yang menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap laporan pembangunan. Aparatur yang konsisten menyampaikan data secara benar memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat. Temuan ini sejalan dengan QS. At-Taubah 9:119 yang menegaskan perintah untuk “bersama orang-orang yang jujur,” menempatkan kejujuran sebagai syarat utama hubungan sosial yang sehat. Dalam konteks pemerintahan desa, *ṣidq* mengurangi spekulasi publik dan membentuk relasi komunikatif yang stabil antara aparatur dan warga. (Development 2026)

Berbagai instansi pemerintah telah mulai mengadopsi pendekatan berbasis nilai keagamaan, seperti melalui kegiatan pembinaan rohani, pengajian rutin, serta penerapan nilai-nilai spiritual dalam budaya organisasi. Meskipun demikian, efektivitas strategi ini masih memerlukan kajian lebih mendalam, terutama dalam melihat sejauh mana nilai-nilai tersebut benar-benar diinternalisasikan dalam perilaku kerja aparatur sehari-hari. Hal ini penting agar program yang dijalankan tidak hanya bersifat simbolis, tetapi mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan integritas.

Selain itu, tantangan dalam implementasi strategi ini juga tidak dapat diabaikan. Keberagaman latar belakang agama, pemahaman individu yang berbeda, serta potensi formalisasi nilai keagamaan menjadi kendala yang perlu dikelola dengan bijak. Oleh karena itu, strategi penguatan integritas melalui nilai keagamaan harus dirancang secara inklusif, kontekstual, dan berorientasi pada nilai universal yang dapat diterima oleh seluruh aparatur.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penguatan integritas aparatur melalui nilai keagamaan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasinya. Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan dan praktik penguatan integritas aparatur yang lebih efektif dan berkelanjutan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena penguatan integritas aparatur melalui nilai-nilai keagamaan, serta menggambarkan strategi yang diterapkan dalam konteks nyata. Metode kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh data yang bersifat mendalam, kontekstual, dan komprehensif terkait perilaku, persepsi, serta pengalaman aparatur, teknik pengumpulan

data menggunakan triangulasi, dan analisis data bersifat induktif sebagaimana dijelaskan oleh (Sugiyono, 2022).

Lokasi penelitian dilakukan di instansi pemerintahan. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa instansi tersebut telah menerapkan program pembinaan nilai keagamaan dalam upaya meningkatkan integritas aparatur.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kajian pustaka (literature review). Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian, baik berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, maupun dokumen resmi yang berkaitan dengan penguatan integritas aparatur dan nilai-nilai keagamaan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari lapangan, melainkan melalui hasil penelitian terdahulu dan referensi ilmiah lainnya. Literatur yang digunakan meliputi jurnal nasional terakreditasi, buku teks administrasi publik, serta publikasi dari lembaga resmi seperti pemerintah dan organisasi terkait yang membahas integritas aparatur, etika birokrasi, serta peran nilai keagamaan dalam pembentukan karakter.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Berdasarkan hasil kajian pustaka dari berbagai literatur, ditemukan bahwa integritas aparatur merupakan unsur kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Integritas tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi juga mencerminkan kualitas moral individu seperti kejujuran, tanggung jawab, serta konsistensi antara perkataan dan tindakan (Kumorotomo, 2014). Hal ini sejalan dengan pandangan Huberts (2018) yang menyatakan bahwa integritas merupakan keselarasan antara nilai, tindakan, dan kewenangan dalam menjalankan tugas publik (Wulandari et al., 2026).

Hasil kajian menunjukkan bahwa rendahnya integritas aparatur masih menjadi persoalan serius dalam birokrasi di Indonesia. Praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta lemahnya etika pelayanan publik menunjukkan bahwa pendekatan yang hanya berfokus pada regulasi dan pengawasan belum cukup efektif (Dwiyanto, 2012). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih menyentuh aspek internal individu, yaitu melalui pembentukan karakter dan nilai moral.

Lebih lanjut, hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai keagamaan memiliki peran penting dalam membentuk integritas aparatur. Nilai seperti *sidq* (kejujuran), amanah (tanggung jawab), dan keadilan menjadi landasan moral dalam membentuk perilaku aparatur yang profesional dan beretika. Menurut Shihab (2007), nilai kejujuran dan amanah merupakan prinsip dasar dalam kehidupan sosial yang harus diimplementasikan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pelayanan publik.

Penelitian Shuhari et al. (2020) juga menunjukkan bahwa kejujuran aparatur berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.

Selain itu, beberapa literatur menunjukkan bahwa strategi penguatan integritas berbasis nilai keagamaan telah diterapkan dalam berbagai instansi pemerintah. Strategi tersebut meliputi pembinaan rohani, kegiatan keagamaan rutin, serta penerapan nilai spiritual dalam budaya organisasi (Kansil & Pusung, 2021). Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran moral dan spiritual aparatur sehingga mampu mendorong perilaku kerja yang berintegritas.

Namun demikian, hasil kajian juga menunjukkan bahwa efektivitas strategi tersebut masih belum optimal. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kegiatan keagamaan seringkali masih bersifat formalitas dan belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku aparatur secara signifikan (Henriyani, 2021).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan integritas aparatur melalui nilai keagamaan merupakan pendekatan yang bersifat fundamental dan berorientasi pada pembentukan karakter. Nilai keagamaan berfungsi sebagai kontrol internal (*self control*) yang mampu mempengaruhi perilaku individu secara lebih mendalam dibandingkan dengan pengawasan eksternal (Keban, 2019). Dengan demikian, integritas tidak hanya dibentuk melalui aturan, tetapi juga melalui kesadaran moral yang tumbuh dari dalam diri aparatur.

Nilai *ṣidq* (kejujuran) memiliki peran sentral dalam membangun integritas aparatur, khususnya dalam konteks pelayanan publik. Kejujuran dalam menyampaikan informasi dan menjalankan tugas akan meningkatkan legitimasi dan kepercayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan Shuhari et al. (2020) yang menyatakan bahwa transparansi informasi berbasis kejujuran mampu memperkuat hubungan antara aparatur dan masyarakat. Dalam perspektif administrasi publik, kejujuran juga menjadi indikator utama kualitas pelayanan publik (Hardiyansyah, 2011).

Selain kejujuran, nilai amanah juga menjadi elemen penting dalam penguatan integritas. Amanah mencerminkan tanggung jawab aparatur dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh negara. Aparatur yang memiliki kesadaran akan nilai amanah cenderung lebih profesional dan menghindari tindakan yang merugikan kepentingan publik (Nurcholish Madjid, 2000). Hal ini menunjukkan bahwa nilai keagamaan memiliki kontribusi nyata dalam membentuk etika kerja aparatur.

Namun demikian, implementasi strategi berbasis nilai keagamaan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kecenderungan formalisasi kegiatan keagamaan yang hanya bersifat seremonial tanpa diikuti dengan internalisasi nilai secara mendalam. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada proses pembinaan yang berkelanjutan serta komitmen individu aparatur (Henriyani, 2021).

Selain itu, keberagaman latar belakang agama dan tingkat pemahaman individu juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas strategi ini. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan harus bersifat inklusif dengan menekankan nilai-nilai universal seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab yang dapat diterima oleh semua pihak (Ismiyarto, 2016).

Lebih lanjut, penguatan integritas melalui nilai keagamaan perlu didukung oleh lingkungan organisasi yang kondusif. Kepemimpinan yang berintegritas, budaya kerja yang menjunjung tinggi etika, serta sistem penghargaan dan sanksi yang adil akan memperkuat implementasi nilai-nilai tersebut dalam praktik kerja sehari-hari (Dwiyanto, 2012). Dengan adanya sinergi antara nilai internal dan sistem eksternal, integritas aparatur dapat terbentuk secara lebih optimal.

Dengan demikian, strategi penguatan integritas aparatur melalui nilai keagamaan memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas moral dan profesionalisme aparatur. Namun, keberhasilannya memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan aspek individu, organisasi, dan sistem secara simultan.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kajian pustaka, dapat disimpulkan bahwa integritas aparatur merupakan faktor kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Integritas tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga mencerminkan kualitas moral individu seperti kejujuran, tanggung jawab, dan konsistensi dalam menjalankan tugas.

Penguatan integritas aparatur melalui nilai keagamaan terbukti memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan perilaku aparatur. Nilai-nilai seperti *sidq* (kejujuran) dan *amanah* (tanggung jawab) mampu menjadi landasan moral dalam meningkatkan profesionalisme dan etika pelayanan publik. Pendekatan berbasis nilai keagamaan juga lebih bersifat internal dan preventif karena menekankan pada kesadaran individu.

Namun demikian, implementasi strategi ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti kecenderungan kegiatan keagamaan yang bersifat formalitas, belum optimalnya internalisasi nilai, serta keberagaman latar belakang aparatur. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan agar nilai-nilai keagamaan benar-benar terimplementasi dalam perilaku kerja sehari-hari.

### **Ucapan Terima Kasih**

Bagian ucapan terima kasih digunakan untuk menyampaikan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan penelitian, baik berupa pendanaan, bantuan akademik, fasilitas penelitian, maupun kontribusi teknis lainnya. Penulis dapat mencantumkan nama lembaga pendanaan, institusi, organisasi, atau

individu yang berkontribusi secara signifikan terhadap penelitian. Ucapan terima kasih ditulis secara singkat, jelas, dan profesional tanpa mencantumkan gelar akademik yang berlebihan.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Dwiyanto, A. (2012). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hardiyansyah. (2011). *Kualitas pelayanan publik*. Yogyakarta: Gava Media.

### **Jurnal**

Development, Anti-corruption Village. 2026. "Al-Ihsan : Jurnal Pengabdian Agama Islam Model Komunikasi Islam Dalam Penguatan Integritas Dan Transparansi Pembangunan Desa Anti-Korupsi Al-Ihsan : Jurnal Pengabdian Agama Islam." 2(2): 1–13. doi:10.25299/aijpai.2025.

Henriyani, E. (2021). Penguatan etika dan integritas aparatur dalam mencegah penyakit birokrasi. *Jurnal Dinamika Ilmu Administrasi Negara*.

Ismiyarto. (2016). *Budaya organisasi dan reformasi birokrasi*. Jakarta: Kencana.

Kansil, D., & Pusung, P. H. (2021). Pola pembinaan integritas aparatur sipil negara. *Jurnal Syntax Transformation*.

Keban, Y. T. (2019). *Enam dimensi strategis administrasi publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Kumorotomo, W. (2014). *Etika administrasi negara*. Jakarta: Rajawali Press.

Madjid, N. (2000). *Islam, doktrin dan peradaban*. Jakarta: Paramadina.

Rozi, M. F., Anam, S., Marsum, M., Suhaimi, S., & Wahyono, S. (2024). Safari Majelis Taklim: Jalan Revitalisasi Nilai-Nilai Keislaman Di Era Modern. *Dirosat: Journal of Islamic Studies*, 9(2), 147-160.

Shihab, M. Q. (2007). *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.

Shuhari, M. H., et al. (2020). Nilai kejujuran dalam komunikasi publik aparatur. *Jurnal Komunikasi*.

Sedarmayanti, Hj, and Nita Nurliawati. "MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN." : 337–62.

Wulandari, Asri, Nadifha Tiara Safitri, Meisya Ayu Azhara, and Adizka Azzahra Aurian. 2026. "Integritas Dalam Birokrasi : Implementasi Kode Etik ASN Pada Pelayanan Publik Pemerintahan Kota Tangerang." 5(2): 912–20.